



# The Effect Of Regional Government's Finance Ratio To Human Development Index Of Provincial Government In Indonesia

Arie Vicky Galan Ramadhan<sup>1</sup> , Erma Setiawati<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Economy and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

<sup>2</sup> Department of Economy and Business, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

 <sup>1</sup>galanrams@gmail.com, <sup>2</sup>ermasetiawati64@gmail.com

## **Abstract**

*The abstract must be short, interesting, simple, and easy to understand without reading the entire article. Therefore, avoid jargon, abbreviations and references. In writing abstracts, the author must be accurate, use the right words, and convey the meaning of the study. A good abstract contains the problem statement and purpose, how the research is carried out (the method), the results, and concludes with a brief statement of conclusions. In the abstract keywords are also always included. Keywords are used to index an article and are the label of an article. [Century 10 pt, italic]*

*The aim of this research is to examine the effect of Regional Government's Finance Ratio based on the Regional Government's Finance Report to Human Development Index that used as a measure to evaluate the regional government's performance on the public service. The Regional Government's Finance Ratio which used in this research is Ratio of Decentralization's Level, Ratio of Regional's Finance Dependency, Ratio of Regional's Finance Autonomy, Ratio of Regional's Real Income Effectiveness, and Ratio of Regional's Tax Effectiveness. The researcher gets the sample by using purposive sampling to all of the provinces in Indonesia on 2016-2018. The analyzing data uses multiple linear regression analysis method by using SPSS Software and Microsoft Office Excel.*

*The result of this research shows that Ratio of Decentralization's level has effect to Human Development Index, meanwhile Ratio of Regional's Finance Dependency, Ratio of Regional's Finance Autonomy, Ratio of Regional's Real Income Effectiveness, and Ratio of Regional's Tax Effectiveness have no effect to Human Development Index.*

**Keywords:** *Human Development Index; Regional Government's Finance Report; and Regional Government's Finance Ratio.*

## **Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia**

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang digunakan sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam hal penyediaan pelayanan publik. Rasio Keuangan Pemerintah Daerah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah. Sampel diperoleh dengan menggunakan metode *purposive sampling* pada seluruh pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018. Analisis data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda menggunakan alat bantu *software* SPSS

(*Statistical Package for the Social Science*) dan *Microsoft Office Excel*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap IPM.

**Kata kunci:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); Rasio Keuangan Pemerintah Daerah.

## 1. Pendahuluan

Pada tahun 1999 Indonesia mulai memberlakukan otonomi daerah, hal tersebut adalah salah satu strategi untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di Indonesia. Otonomi daerah merupakan penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya supaya setiap daerah dapat mengoptimalkan pembangunan pada daerahnya masing-masing.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka pemerintah daerah mempunyai tugas-tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa tugas pemerintah daerah adalah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.

Tujuan diberlakukannya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan daerah, terutama dalam hal meningkatkan pembangunan daerah di berbagai aspek. Tuntutan pelaksanaan otonomi daerah pada setiap daerah di Indonesia yaitu untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Halim (2014) menjelaskan bahwa kemampuan daerah dalam menjalankan desentralisasi dapat dilihat dengan mengetahui kinerja keuangan daerah. Salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Mahmudi (2016) juga menjelaskan beberapa rasio yang digunakan sebagai indikator kinerja keuangan pemerintah daerah antara lain rasio derajat desentralisasi keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

*United Nation Development Program* (UNDP) pertama kali memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 1996. Katalog BPS mengenai Indeks Pembangunan Manusia menyatakan bahwa IPM digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan di suatu wilayah melalui layanan publik yang baik. Menurut UNDP, IPM menjadi alat ukur yang peka untuk menggambarkan perubahan yang terjadi pada dimensi standar hidup layak. Aspek standar kehidupan tersebut dilihat dari usia yang panjang dan hidup sehat serta tingkat pendidikan yang memadai. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara tergolong negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang. Serta IPM juga digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup suatu negara.

Menurut UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur yang panjang dan kesehatan, pengetahuan, serta kehidupan yang layak.

Namun Mouw (2013) menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan bentuk intervensi pemerintah terhadap masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan, tetapi sampai saat ini intervensi tersebut belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat, sehingga masih banyaknya keluhan atas rendahnya kualitas pelayanan publik. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dalam rangka mematuhi kebutuhan dasar masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi pemerintah yang menyangkut pemenuhan hak-hak sipil serta kebutuhan dasar masyarakat, belum nyata dilihat dari kinerja birokrasi pemerintah selama ini. Karena jika melihat fenomena dewasa ini masih banyak keluhan dan pengaduan dari masyarakat, seperti cara kerja pelayanan yang berbelit-belit, tidak adanya transparansi dan akuntabilitas, terbatasnya fasilitas, kurangnya sarana dan prasarana pelayanan.

Tingkat pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah memiliki andil besar dalam terciptanya pelayanan publik yang optimal diiringi dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga bermuara pada peningkatan pembangunan manusia yang berkesinambungan. Semakin tinggi pendapatan daerah maka akan memiliki kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan manusia di daerah tersebut.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Tika Anggraini dan Sutaryo (2015) yang menggunakan sampel penelitian 33 pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2010-2013. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan sama dengan penelitian sebelumnya. Penelitian tersebut menggunakan Indeks Pembangunan Manusia sebagai variabel dependen dan Rasio Keuangan Daerah sebagai variabel independen., rasio keuangan yang digunakan yaitu Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada tahun data yang di olah yaitu pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia”.

## **2. Literatur Review**

### **2.1. Teori Agensi**

Menurut Nugroho (2017) teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika principal mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent.

### **2.2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Pemerintah Daerah sebagai salah satu entitas pelapor setiap periodenya juga membuat laporan yang disebut Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Bab I Pasal 1 dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode.

### **2.3. Rasio-Rasio Keuangan Daerah**

#### **Rasio Derajat Desentralisasi**

Derajat Desentralisasi adalah kemampuan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli daerah guna membiayai pembangunan. Derajat

desentralisasi dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mahmudi, 2007).

#### **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah menunjukkan tentang seberapa besar ketergantungan suatu pemerintah provinsi terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Pada umumnya, kontribusi terbesar pendapatan transfer terdapat pada dana perimbangan seperti dana alokasi umum, yaitu dana yang digunakan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Rasio ini adalah perbandingan antara total realisasi pendapatan transfer dengan total realisasi pendapatan daerah (Mahmudi, 2016).

#### **Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan ketergantungan keuangan daerah terhadap sumber pendanaan yang berasal dari eksternal. Semakin tinggi angka rasio kemandirian keuangan daerah berarti ketergantungan pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat semakin rendah, dan begitu pula sebaliknya (Mahmudi, 2016).

#### **Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Dalam rasio tersebut akan diperoleh perbandingan antara PAD yang telah ditargetkan dengan PAD yang terealisasi. Angka rasio efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu memenuhi target penerimaan PAD yang telah dianggarkan sebelumnya (Mahmudi, 2016).

#### **Rasio Efektivitas Pajak Daerah**

Rasio efektivitas pajak daerah berguna untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam mengumpulkan pajak yang harus diterima sesuai dengan jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan (Mahmudi, 2016).

### **2.4. Indeks Pembangunan Manusia**

Menurut BPS, IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

## **3. Metode**

### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan hubungan antara rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dan rasio efektivitas pajak daerah terhadap indeks pembangunan manusia (IPM).

### **3.2. Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia pada tahun 2016-2018. Sampel penelitian ini diperoleh menggunakan *purposive sampling*. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018.
2. Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan di audit.
3. Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

4. Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang menyajikan data keuangan untuk digunakan dalam perhitungan rasio.

### **3.3. Data dan Sumber Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016-2018 di seluruh pemerintah provinsi di Indonesia.

### **3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan rasio-rasio keuangan daerah meliputi rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) dan rasio efektivitas pajak daerah.

#### **Variabel Dependen**

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan dan pengeluaran.

#### **Variabel Independen**

##### **a. Rasio Derajat Desentralisasi**

Derajat desentralisasi dihitung dengan cara membandingkan antara jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total penerimaan daerah.

##### **b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah.

##### **c. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah.

##### **d. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Rasio efektivitas PAD dihitung berdasarkan perbandingan jumlah realisasi penerimaan PAD dengan jumlah target penerimaan PAD.

##### **e. Rasio Efektivitas Pajak Daerah**

Rasio efektivitas pajak daerah dihitung berdasarkan perbandingan jumlah realisasi penerimaan pajak daerah dengan jumlah target penerimaan pajak daerah.

### **3.5. Metode Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Statistik deskriptif juga digunakan untuk mendapatkan deskripsi mengenai data-data terkait dalam penelitian ini. Asumsi klasik juga digunakan untuk mengetahui apakah data telah memenuhi asumsi klasik dan dapat diterapkan pada model regresi.

Analisis linier berganda dimaksudkan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel-variabel independen dengan variabel dependen, yaitu pengaruh Rasio-Rasio Keuangan Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam penelitian ini pengolahan data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan *software* SPSS (*Statistical Package*

for the Social Science) dan *Microsoft Office Excel*. Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$IPM = \beta_0 + \beta_1 RDD + \beta_2 R_{ketKD} + \beta_3 R_{KemKD} + \beta_4 R_{EfePAD} + \beta_5 R_{EfePD} + e$$

### 3.6. Uji Hipotesis

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang telah diungkapkan, maka dibutuhkan pengujian hipotesis yang sesuai terkait hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji koefisien determinan ( $R^2$ ), uji signifikansi T dan uji signifikansi F.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1. Deskripsi Populasi dan Sampel

Tabel 1. Hasil Seleksi Sampel dengan Purposive Sampling

NO	Keterangan	Jumlah
1	Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018.	34
2	Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang tidak menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan di audit.	(0)
3	Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang tidak mempunyai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.	(0)
4	Pemerintah provinsi di Indonesia tahun 2016-2018 yang tidak menyajikan data keuangan untuk digunakan dalam perhitungan rasio.	(0)
<b>Jumlah Perusahaan Sampel</b>		34
<b>Jumlah Sampel (34 x 3 Tahun) dan diolah</b>		102

Sumber: Data sekunder olah, 2020

### 4.2. Uji Asumsi Klasik

#### a. Hasil Uji Normalitas Data

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Data

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	0,795
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,553
Keterangan	Normal

Sumber: Data Hasil Olah, 2020

Dari data diatas diketahui bahwa nilai signifikan atau *probability* 0,553. Dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian tersebut berdistribusi normal.

#### b. Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Tabel Hasil Uji Multikolinearitas Data

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Rasio Derajat	0,120	8,339	Bebas
Desentralisasi			Multikolinearitas
Rasio Ketergantungan	0,326	3,067	Bebas
Keuangan Daerah			Multikolinearitas
Rasio Kemandirian	0,126	7,968	Bebas
Keuangan Daerah			Multikolinearitas

Rasio Efektivitas PAD	0,540	1,852	Bebas Multikolinearitas
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	0,603	1,659	Bebas Multikolinearitas

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2020

Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *tolerance* > 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.

#### c. Hasil Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 4. Hasil Uji Heterokedastisitas**

Variabel	<i>p-value</i>	Keterangan
Rasio Derajat Desentralisasi	0,547	Bebas Heterokedastisitas
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	0,544	Bebas Heterokedastisitas
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,430	Bebas Heterokedastisitas
Rasio Efektivitas PAD	0,974	Bebas Heterokedastisitas
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	0,691	Bebas Heterokedastisitas

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2020

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel IV.4 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai *p value* > 0,05 (Ghozali, 2011:142-143). Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dan model regresi tersebut layak digunakan dalam penelitian ini.

#### d. Uji Autokorelasi

**Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi**

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Runs Test - Z	0,398
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,691

a. Median

Hasil uji dapat dilihat pada signifikansi (Asymp sig. 2 tailed) dengan nilai 0,691 > 0,05. Kesimpulannya, tidak ada autokorelasi dalam analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

### 4.3. Hasil Analisis Regresi

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	$T_{hitung}$	<i>Sig</i>	Ket
<i>Constanta</i>	73,688	11,179	0,000	
Rasio Derajat	10,988	2,094	0,039	H1

Desentralisasi				diterima
Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah	-3,872	-1,334	0,185	H2 ditolak
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	0,377	0,246	0,807	H3 ditolak
Rasio Efektivitas PAD	0,184	0,056	0,956	H4 ditolak
Rasio Efektivitas Pajak Daerah	-5,733	-1,777	0,079	H5 ditolak
R <sup>2</sup> = 0,480		Fhitung= 17,726		
Adjusted R <sup>2</sup> = 0,453		Sig = 0,000		

Sumber: Hasil olah data sekunder, 2020

Berdasarkan dengan hasil uji regresi linier berganda pada tabel 6, maka hasil perhitungan regresi liner berganda sebagai berikut:

$$IPM = 73,688 + 10,988 RDD - 3,872 RketKD + 0,377 RKemKD + 0,184 REfePAD - 5,733 REfePD + e$$

- Nilai konstanta sebesar 73,688 menunjukkan bahwa jika variabel rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efektivitas pajak daerah diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel rasio derajat desentralisasi bernilai positif sebesar 10,988. Artinya apabila semakin besar rasio derajat desentralisasi maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin kecil rasio derajat desentralisasi maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menurun.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel rasio ketergantungan keuangan daerah bernilai negatif sebesar -3,872. Artinya apabila semakin besar rasio ketergantungan keuangan daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menurun. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin kecil rasio ketergantungan keuangan daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel rasio kemandirian keuangan daerah bernilai positif sebesar 0,377. Artinya apabila semakin besar rasio kemandirian keuangan daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin kecil rasio kemandirian keuangan daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menurun.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel rasio efektivitas PAD bernilai positif sebesar 0,184. Artinya apabila semakin besar rasio efektivitas PAD maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin kecil rasio efektivitas PAD maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan menurun.
- Dari hasil uji hipotesis menunjukkan besarnya koefisien regresi variabel rasio efektivitas pajak daerah bernilai negatif sebesar -5,733. Artinya apabila semakin besar rasio efektivitas pajak daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



akan menurun. Begitu pula sebaliknya, apabila semakin kecil rasio efektivitas pajak daerah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan meningkat.

#### 4.4. Hasil Uji Hipotesis

##### a. Uji Fit Model (Uji F)

Untuk variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) didapatkan hasil nilai  $F_{hitung}$  (17,726) dengan nilai  $p-value = 0,000$ . Hasil uji dari  $p-value$  ( $0,000 < 0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdiri dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efektivitas pajak daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan model regresi dapat dikatakan fit.

##### b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil perhitungan untuk nilai adjusted  $R^2$  dengan bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi atau adjusted  $R^2$  sebesar 0,453. Hal ini berarti bahwa 45,30% variasi variabel manajemen laba dijelaskan oleh variabel dari rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efektivitas pajak daerah. Sementara sisanya 54,70% diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi penelitian ini. Maka dapat disimpulkan bahwa, dari hasil uji tersebut menunjukkan bahwa model penelitian goodness-fit.

##### c. Uji statistik t

Berdasarkan hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa:

1. Nilai t hitung untuk variabel rasio derajat desentralisasi sebesar 2,094 > 1,98304 dan nilai signifikan sebesar 0,039 < 5%, sehingga **H1 diterima** yang artinya rasio derajat desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
2. Nilai t hitung untuk variabel rasio ketergantungan keuangan daerah sebesar -1,334 < 1,98304 dan nilai signifikan sebesar 0,185 > 5%, sehingga **H2 ditolak** yang artinya rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
3. Nilai t hitung untuk variabel rasio kemandirian keuangan daerah sebesar 0,246 < 1,98304 dan nilai signifikan sebesar 0,807 > 5%, sehingga **H3 ditolak** yang artinya rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
4. Nilai t hitung untuk variabel rasio efektivitas PAD sebesar 0,056 < 1,98304 dan nilai signifikan sebesar 0,956 > 5%, sehingga **H4 ditolak** yang artinya rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
5. Nilai t hitung untuk variabel rasio efektivitas pajak daerah sebesar -1,777 < 1,98304 dan nilai signifikan sebesar 0,079 > 5%, sehingga **H5 ditolak** yang artinya rasio efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### 4.5. Pembahasan Hasil Analisis

##### a. Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan uji t yang dilakukan memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $2,094 > 1,98304$  dan nilai signifikan sebesar  $0,039 < 5\%$ , sehingga **H<sub>1</sub> diterima** yang artinya rasio derajat desentralisasi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**b. Pengaruh Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $-1,334 < 1,98304$  dan nilai signifikan sebesar  $0,185 > 5\%$ , sehingga **H<sub>2</sub> ditolak** yang artinya rasio ketergantungan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**c. Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $0,807 > 5\%$ , sehingga **H<sub>3</sub> ditolak** yang artinya rasio kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**d. Pengaruh Rasio Efektivitas PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar kompetensi sebesar  $0,056 < 1,98304$  dan nilai signifikan sebesar  $0,956 > 5\%$ , sehingga **H<sub>4</sub> ditolak** yang artinya rasio efektivitas PAD tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**e. Pengaruh Rasio Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkan hasil uji t memperoleh nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sebesar  $-1,777 < 1,98304$  dan nilai signifikan sebesar  $0,079 > 5\%$ , sehingga **H<sub>5</sub> ditolak** yang artinya rasio efektivitas pajak daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasio Derajat Desentralisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Efektivitas Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya. Keterbatasan tersebut diantaranya populasi penelitian yang digunakan hanya pemerintah provinsi di Indonesia dikarenakan keterbatasan data IPM dilevel kabupaten/kota, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data final IPM yang diperoleh dari situs Badan Pusat Statistik sehingga peneliti belum mengkonfirmasi kebenaran dan keakuratan data nilai IPM tersebut dan periode yang digunakan dalam penelitian ini hanya 3 tahun yaitu periode tahun 2016-2018.

Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel yang lebih besar dengan jangkauan penelitian yang lebih luas, menambahkan rasio penelitian keuangan yang lain dan menambahkan periode data yang digunakan.

## Referensi

- [1] Republik Indonesia. UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. *Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.*
- [2] Halim, Abdul. 2014. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: *Salemba Empat.*
- [3] UNDP Indonesia, Indonesia Human Development Report (2016). Published Jointly by *BPS - Statistic Indonesia.*
- [4] Mouw, Erland. 2013. Kualistas Pelayanan Publik di Daerah. *Jurnal UNIERA* Vol 2 Nomor 2; ISSN 2086-0404.
- [5] Tika A, Sutaryo. 2015. Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 18, Medan, 2015.*
- [6] Nugroho, P. I. (2017). Konservatisme Akuntansi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 20, No. 1. ISSN: 1979 – 6471.*
- [7] Republik Indonesia. PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. *Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.*
- [8] Mahmudi. 2016. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Yogyakarta: *Unit Penerbitan Percetakan YKPN.*
- [9] Badan Pusat Statistik. Katalog BPS: 4102002. *Indeks Pembangunan Manusia.* BPS Jakarta-Indonesia.
- [10] Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia tahun 2016-2018. *BPKRI.*